

Implementasi Kaidah "Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak" dalam Perspektif Fikih Keluarga.

(The Implementation of the Principle "Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak"in the Perspective of Family Figh)

Rima Rahmayani Tanjung, Muhammad Amar Adly, Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rimasitanjung@gmail.com

Abstract: This article examined the application of the Islamic legal maxim alyaqīnu lā yuzālu bi al-syak ("certainty is not overruled by doubt") within the framework of family law. It analyzed how this principle has been interpreted and applied in resolving legal issues such as divorce (talāq), maintenance (nafaqah), and legal certainty in marital relationships. Employing a qualitative, descriptive-analytical method, the study drew upon both classical Islamic jurisprudential sources—such as those authored by al-Qarāfī, al-Suyūtī, and al-Nawawi—and contemporary legal scholarship. The analysis was grounded in the methodology of qawa id fiqhiyyah (Islamic legal maxims), supported by textual sources (the Qur'an and Hadith), consensus (ijmā'), and rational arguments. The findings demonstrated that the maxim plays a pivotal role in maintaining legal stability by ensuring that established certainties are not invalidated by subsequent doubts. Moreover, the study identified several exceptions to the maxim's applicability, particularly in ambiguous or multiinterpretable cases, revealing the principle's flexibility and relevance in modern legal contexts.

Keywords: Certainty, Doubt, Family Law, Islamic Legal Maxims, Qawāʻid Fiqhiyyah

Pendahuluan

Ajaran agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru, agama ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Inilah yang menjadikan alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal: pertama, adanya keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga merasa perlu untuk

ditambah, atau yang kedua, karena lemahnya akal (kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama).1

Kaidah Fiqh merupakan ilmu yang membantu secara mekanis dalam masalah-masalah furu'. Kaidah fiqh juga dirumuskan untuk menyederhanakan dalam masalah furu' atau fighiyyah. Dalam literasi hukum Islam, kedua kaidah ini terkadang saling membaur, dalam artian terkadang kaidah ushul tidak terlepas dalam bahasan yang sama dengan kaidah fiqh, meskipun demikian masing-masing memiliki batasan dan jangkauan tersendiri. Ulama yang pertama kali membedakan antara kaidah ushul dan kaidah fikih adalah Syihabuddin al-Qarafi (w.684) dalam kitabnya al-Furuq.² Kaidah ushul dalam penerapanya sebagai Takhrij al Ahkam (mengeluarkan hukum dari sumbernya), sedangkan kaidah fikih adalah Tathbig al-Ahkam yang penerapannya pada kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia. Kaidah fikih berkembang pesat sesuai dengan budaya dan peradaban manusia pada tiap masanya.³

Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Ibn Nujaim menambah satu kaidah, sehingga menjadi enam, dan menyebutnya dengan istilah al-qawa'id al-asāsīyah (kaidah- kaidah pokok). Salah satu kaidah tersebut adalah kaidah asasiyyah kedua yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.⁴

Hukum Islam memiliki kaidah-kaidah dasar yang menjadi pedoman dalam menerapkan aturan-aturan syariat. Salah satu kaidah penting adalah kaidah kedua, yaitu "Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak" yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini mengajarkan bahwa ketika seseorang sudah memiliki keyakinan yang kuat mengenai suatu hal, maka keraguan yang muncul kemudian tidak boleh menjadi dasar untuk menggugurkan keyakinan tersebut. Prinsip ini digunakan untuk menghindari ketidakpastian dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Fikih munakahat atau sering disebut dengan hukum perkawinan Islam merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pernikahan mulai akad nikah hingga berumah tangga, bahkan berakhinya rumah tangga.⁶

Kaidah ini menunjukkan kepada semakin sempurnanya agama Islam. Apabila kaidah ini diterapkan, maka akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang

¹ Aulia Nurrosidha dkk., "Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan," NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam 13, no. 1 (1 Desember 2022): 1, https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1272.

² Said Aqil al-Munawwar, "Al-Qawaid al-Fiqivyah dalam Perspektif Hukum Islam," al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, no. 62/XII (1998): 102, State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan

³ Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, "Kaidah Fiqh Bidang Mu'amalah Mazhab Syafi'i," *Jurnal Iqtisad*: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 6, no. 1 (2019): 35.

⁴ Siti Rahmah, "Penerapan Kaidah اليقين لا يزول بالشك (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan) Dan Implementasinya Dalam Aktivitas Ekonomi Syariah," Ghanimah: Journal of Shariah Economics and Business 1, no. 1 (2025): 52.

⁵ ibid., 51.

⁶ Ah Soni Irawan dan Nina Agus Hariati, "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh Munakahat," Fighul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam 2, no. 1 (2024): 15.

membawa rahmat bagi semesta alam, karena semua sadar bahwa kehidupan ini tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebut dengan keraguan, yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang. Islam dengan kesempurnaannya memberikan jalan keluar kepada umatnya, yaitu dengan adanya kaidah yang agung ini.⁷

Seseorang yang berbuat sesuatu (beramal) harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima. Juga dapat dipahami bahwa, setiap perkara yang tetap, tidak akan berubah dengan sebab kedatangan bukti yang terdapat syak (keraguan) padanya. Keyakinan merupakan suatu perkara yang bersifat tetap dan bersifat berlawanan terhadap syak. Lazimnya, sesuatu yang benar-benar diyakini sudah pasti tidak akan dirubah oleh syak karena kedua-duanya adalah perkara yang sangat berbeda. Sesuatu perkara itu hanya akan dikatakan sebagai yakin setelah terdapat bukti dan penelitian yang dapat menetapkan adanya perkara tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak dalam konteks fikih keluarga serta bagaimana batasan dan pengecualian penerapannya, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual dan aplikatif penerapan kaidah tersebut dalam hukum keluarga Islam, serta menjelaskan perbedaan sudut pandang klasik dan kontemporer terhadap penggunaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptifanalitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih Islam, khususnya yang berkaitan dengan kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup kitabkitab klasik seperti al-Furūq karya al-Qarāfī, al-Asybāh wa al-Nazā'ir karya as-Suyūtī, serta karya al-Nawawī dalam Syarh Şahīh Muslim. Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur modern seperti karya Wahbah al-Zuhaili dan jurnal-jurnal ilmiah kontemporer.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tekstual untuk mengkaji redaksi dan kandungan kaidah, serta analisis kontekstual untuk mengevaluasi penerapannya dalam kasus-kasus fikih keluarga. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji norma fikih yang bersifat prinsipil namun juga aplikatif dalam konteks sosial-keagamaan saat ini.

Pembahasan Dan Diskusi

A. Pengertian dan Makna Kaidah

⁷ Aulia Nurrosidha, dkk, Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan, Nalar Figh: Jurnal Hukum Islam, 13,1 (2002): 5.

Kaidah لَا يُرْفَعُ yang artinya لَا يُرْفَعُ yang artinya لَا يُزَالُ atau لِيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ "Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan".8

Secara bahasa, al-yaqin (keyakinan) dapat dipahami sebagai ketenangan hati terhadap kebenaran suatu hal. Dalam konteks ini, istilah ini merujuk pada keadaan di mana seseorang merasa tentram dan percaya sepenuhnya terhadap suatu kenyataan. Sebagai contoh, dikatakan "air sudah yakin di dalam kolam" apabila air tersebut telah stabil dan tidak bergerak lagi, yang menggambarkan keteguhan dan kestabilan. Alsyak dalam bahasa merujuk pada keadaan ragu atau bingung antara dua kemungkinan tanpa adanya kecenderungan untuk memilih salah satunya. Keraguan ini menggambarkan ketidaktegasan dalam mengambil keputusan atau penilaian terhadap suatu hal.9

adalah kata dalam berbahasa Arab yang berarti pasti, kuat, nyata; الْيَقِيْنُ maksudnya adalah pengetahuan dengan perasaan pasti terhadap sesuatu. Kebalikan dari اليَقِيْنُ adalah المُقَاتِّ yang berarti rasa kurang percaya. Persoalan yakin terkait dengan persoalan keimanan (akidah) dan persoalan dalil hukum dalam syari'at Islam. Adapun secara istilah *Al-yaqin* adalah sampainya keyakinan akibat terjadinya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Istilah lain menyatakan keyakinan merupakan sikap meyakini dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan yang sesuai dengan realita tanpa adanya kemungkinan untuk menghilangkanya, artinya keyakinan merupakan suatu bentuk penetapan yang tidak dapat dihilangkan oleh keraguan yang baru datang kecuali dapat ditandingkan dengan keyakinan yang sederajat.¹¹

yang tugasnya merafa'kan isim ِلَيْسَ merupakan huruf mutasyabihat pada لَا يُزَالُ dan menasobkan khobar, dan jika masuk pada fi'il maka amalnya mulghoh (tidak bisa beramal) tetapi artinya tetap, yaitu tidak bisa atau tidak dapat. dalam bahasa يُزَالُ dalam bahasa Arab adalah kalimat fi'il mudhorik mabni majhul karena adanya kalimat fi'il yang menghadapi/bertemu dengan huruf jar, dari fi'il madhi zaala mengikut pada wazan fa'ala yaf'ilu fi'lan, yang artinya adalah dihilangkan.

Kemudian بالشَّكِ adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya ragu, keraguan atau rasa kurang percaya. Sedangkan secara istilah Al-Syak adalah berhenti/tidak dapat menentukan diantara dua perkara dan hati tidak condong kepada salah satunya. Artinya sesuatu yang masih membingungkan/tidak menentu antara iya atau tidak karena keduanya saling berlawanan tanpa dapat dimenangkan salah satunya, jika keduanya tidak seimbang, maka yang lebih unggul disebut prasangka (al-dzan) dan yang lemah disebut salah duga (al-wahm).¹³

⁸ Muhammad Sidqi ibn Ahmad Burnu, Al-Wajiz Fi Idah Qawa`Id Al-Fiqh Al-Kuliyyah (Beirut-Lubnan: Mu'assasat al-Risalah, 2002), 166.

⁹ ibid., 168.

¹⁰ Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1958.

¹¹ Jaih Mubarak, Kaidah Figh: Sejarah dan kaidah asasi, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

¹² Bisri Musthofa, Ausathul Masalik Li Alfiyah Ibn Malik (Menara Kudus, 1953), 80.

¹³ Syihab al-Din al-Qarafi, Al-Furuq, Juz 1 (Kuwait: Dar al-Nawadir, t.t.), 222.

Untuk dapat memahami perbedaan antara Al-yagin dan Al-Syak, maka harus mengetahui bahwa tingkat daya akal dalam merangsang dan menangkap segala sesuatu itu sering berbeda-beda. Jika dijadikan tingkatan secara berurutannya adalah: Al-yaqin (keyakinan), Al-dzan (perkiraan atau dugaan), Al-Syak (keraguan) dan Alwahm (salah duga).¹⁴

Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam baik yang berhubungan dengan fiqh maupun lainya. kaidah ini merupakan satu diantara lima kaidah asasiyah (al-qawa'id al-khamsah) yang diklasifikasikan oleh Abdul Aziz Muhammad Azam termasuk qawa'id kulliyyah kubra, yaitu kaidah-kaidah fiqh yang disepakati oleh semua madzhab meskipun dalam mengaplikasikanya terhadap beberapa permasalahan fiqh masih terjadi perbedaan pendapat. 15 Kaidah al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak merupakan salah satu dari enam kaidah induk fikih, dari setiap kaidah induk tersebut terlahir kaidah-kaidah cabang. Kaidah al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak terdiri dari beberapa kata dan setiap kata memiliki arti masing-masing, jika dilihat dari susunan katanya maka terdiri dari dua kata inti yaitu al-Yaqin dan al Syak. 16

Kaidah ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu obyek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat (asumtif/dzan). Oleh karenanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keragu raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan kedalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini.¹⁷

Adapun macam-macam Al-Syak:

Menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Al-Asyfirayiniy, Al-Syak terbagi menjadi tiga macam¹⁸:

1. Al-Syak atas Asal yang haram

Misalnya: Ada seekor kambing disembelih di daerah yang berpenduduk campuran antara Muslimin dan Majusi. Maka kambing tersebut hukumnya tidak halal, sebab Asalnya haram.

¹⁵ Irawan dan Hariati, "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh Munakahat," 17.

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair* (Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1985), 74.

¹⁴ Jaih Mubarak, Kaidah Figh: Sejarah dan kaidah asasi, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 128.

¹⁶ Iskandar dkk., "Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat," BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam no. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.366.

¹⁷ Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 75.

2. Al-Syak atas Asal yang mubah

Misalnya: Ada air berubah, yang mungkin disebabkan oleh najis dan mungkin pula karena terlalu lama tergenang. Menurut hukum, air tersebut dapat digunakan, sebab Asalnya memang air itu suci.

3. *Al-Syak* atas sesuatu yang tidak diketahui asalnya

Misalnya: A berhubungan kerja dengan orang yang sebagian besar uangnya adalah uang haram. Hukumnya boleh, sebab tidak dapat diketahui darimana uang yang digunakan untuk muamalah itu berasal.

"اليقيْنُ Dan yang perlu dicatat bahwa kaidah ini mempunyai bandingan, yakni "النيقيْنُ yang artinya "yakin itu terkadang hilang sebab bimbang." Tetapi kaidah قَدْ يُزَالُ بِالشَّكِّ" yang menjadi banding ini hanya berlaku pada beberapa masalah, bahkan Syaikh Abul 'Abbas Ahmad bin Al-Qash membatasi kaidah ini hanya pada sebelas masalah, sedang Imam Nawawi menambahkan dengan beberapa masalah, begitu pula Imam Subkiy. Misalnya: Orang-orang akan melakukan shalat Jum'at, tetapi mereka merasa ragu, apakah waktu Jum'at masih ada ataukah sudah berlalu? Maka berdasarkan kaidah ini, waktu jumat sudah berlalu.¹⁹

B. Dalil dan Asal Kaidah

Kaidah fikih ini dilandasi banyak ayat dalam Al-quran, Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, dalil 'aqli maupun Ijma' ulama:

1. Al-quran

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran." (OS. Yunus: 36)²⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dari zann adalah keadaan yang tidak didasari dengan ilmu terhadap sesuatu. Keadaan itu adalah keadaan di atas keragu-raguan. Ayat ini menjelaskan bahwa keadaan ini sama sekali tidak akan mencapai derajat yakin dan tidak tidaklah mungkin keraguan menggantikan keyakinan, maka jika keraguaan itu bertemu dengan keyakinan maka tidak akan memperkuat derajat yakin itu dan keyakinan itu akan tetap pada keadaannya.²¹

¹⁹ Abu Bakar al-Ahdal, Fara'idul Bahiyyah: Risalah Qawa'id Fiqh, terj. Moh. Adib Bisri (Kudus: Menara Kudus, 1997), 17.

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, terj. Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Yunus [10]: 36.

²¹ Iskandar dkk., "Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat," 319.

"Padahal, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran." $(Os. Al-najm 28)^{22}$

Al-Dausarī menerangkan bahwa kata zann pada ayat ini bermakna sesuatu yang tidak jelas, sementara kata zann kebanyakannya dimaksudkan dengan persangkaan yang buruk. Ayat ini menjelaskan bahkan begitu lemahnya zann tersebut sehingga tidak bermanfaat sama sekali terhadap kebenaran. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika keraguan itu bertemu dengan keyakinan maka tidak akan memperkuat derajat yakin itu dan keyakinan itu akan tetap pada keadaanya.²³

2. Hadits Nabi

"Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah keluar sesuatu (kentut) atau belum, maka janganlah dia keluar dari masjid (membatalkan salatnya) hingga dia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim: 362)

Imam Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa Hadis ini merupakan salah satu pokok ajaran dalam Islam dan termasuk kaidah besar dalam ilmu fikih, yaitu bahwa segala sesuatu tetap dihukumi sesuai dengan keadaan asalnya hingga terdapat keyakinan yang menunjukkan sebaliknya. Keraguan yang muncul setelah itu tidak berpengaruh terhadap hukum asal tersebut.²⁴

Pada hadis di atas Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketika terjadi keraguan dalam salat tentang batalnya wudu setelah sebelumnya telah bersuci (berwudu), bahwa seorang muslim tetap di dalam salatnya dan keraguan itu sama sekali tidak akan memudaratkannya. Meskipun hadis ini berkaitan dengan pembahasan wudu, akan tetapi para ulama memasukkannya ke dalam semua masalah-masalah fikih yang terjadi di dalamnya yakin dan keragu-raguan.²⁵

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَبْدِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شُكِيَّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْبًا أَوْ يَجدَ ربحًا).

²² Al-Qur'an dan Terjemahnya, terj. Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Najm [53]: 28.

²³ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, al-Munti' fī al-Qavā'id al-Fighiyyah, 117.

²⁴ Muhammad Sidqi ibn Ahmad Burnu, *Al-Wajiz Fi Idah Qawa`Id Al-Fiqh Al-Kuliyyah*, 167.

²⁵ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, al-Mumti 'fī al-Qawā 'id al-Fiqhiyyah, 118.

"Bahwa ada seseorang mengadu kepada Nabi Muhammad saw. tentang seseorang yang merasakan sesuatu di dalam salatnya, maka beliau saw. bersabda: Janganlah dia membatalkan salatnya atau meninggalkan salatnya sampai mendengarkan suara atau mencium bau."

Imam al-Nawawī, berkata: hadis ini merupakan asas dari asas-asar Islam dan kaidah yang begitu agung dari kaidah-kaidah fikih yaitu sesuatu dihukumi berdasarkan asalnya sampai ada sesuatu yang meyakinkan bahwa keadaannya telah berubah dan keraguan yang muncul tiba-tiba sama sekali tidak memudaratkannya.²⁶

3. Dalil 'Aqli

"Keyakinan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada keraguan, karena keyakinan didasarkan pada ketetapan hukum yang pasti dan jelas. Oleh karena itu, keyakinan tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan."27

4. Ijma' Ulama

Tidak hanya dalil-dalil dari Al-quran dan sunnah saja yang melandasi kaidah ini, akan tetapi para ulama pun telah sepakat tentang penerapan kaidah ini. Imam Al-Qorofi berkata: "Kaidah ini telah disepakati oleh para ulama, dan bahwasanya setiap hal yang diragukan dianggap seperti tidak ada."28

C. Cabang-Cabang Yang Terkandung Dalam Kaidah:

Kaidah ini masuk hampir dalam semua bab fikih, bahkan masalah-masalah yang didasarkan pada kaidah ini berjumlah lebih dari tiga perempat dari masalah fikih.²⁹ Beberapa diantaranya:

الأصل بقاء ما كان على ما كان 1.

"Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula"

Misal: Seseorang mempunyai wudhu, lalu ia ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka hukumnya ia tetap mempunyai wudhu.

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذَّمَّةِ 2.

"Asalnya itu lepasnya tanggungan / tanggung jawab"

²⁶ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarh Şahih Muslim ibn Hajjāj*, jil. 4 (cet. II; Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H), 49.

²⁷ Muhammad Sidqi ibn Ahmad Burnu, Al-Wajiz Fi Idah Qawa`Id Al-Fiqh Al-Kuliyyah, 168.

²⁸ Syihab al-Din al-Qarafi, Al-Furuq, Juz 1 (Kuwait: Dar al-Nawadir, t.t.), 222.

²⁹ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair* (Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1985), 51.

Misal: Seseorang yang memakan makanan orang lain kemudian ia berkata bahwa dia telah membolehkannya untuk saya, sementara yang memiliki makanan itu memungkirinya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan si pemilik makanan, karena asalnya adalah tidak adanya kemubahan.

مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَنْتًا أَوْ لَا؟ فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ 3.

"Jika ada orang ragu, apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka ia dianggap belum berbuat"

مَن تَيَقَّنَ الفَعْلَ وَشَكَّ فِي القَليلِ أَوْ الكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الكَثِيرِ 4.

"Jika seseorang telah yakin berbuat (sesuatu), tetapi ia ragu tentang banyak sedikitnya, maka yang dihitung adalah yang sedikit."

Misal: Seseorang sedang tengah-tengah sholat Dhuhur merasa ragu, apakah yang dikerjakannya empat raka'at, atau baru tiga raka'at. Berdasarkan kaidah ini, yang dihitung adalah tiga raka'at dan ia harus menambah satu raka'at lagi.

الْأَصْلُ الْعَدَمُ 5.

"Asal (di dalam hak) itu tidak ada."

Misal: A menyerahkan Rp.1.000,- kepada B, untuk digunakan sebagai modal, dengan perjanjian keuntungan dibagi dua. Selang beberapa lama, A menuduh bahwa B telah memperoleh keuntungan dari uang modal tersebut, tetapi B menyangkal tuduhan itu. Berdasarkan kaidah ini, yang dibenarkan adalah B yang menyatakan tidak/belum ada keuntungan.³⁰

الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيْمُ 6.

"Hukum asal abdoi' (farj/kemaluan) adalah haram"

D. Penerapan Kaidah Dalam Hukum Keluarga

Kaidah " اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بالشَّكِ ", seperti yang dibahas di atas bahwa apabila seseorang meyakini bahwa ia telah melakukan sesuatu namun ia ragu telah melakukan dengan bilangan yang banyak atau bilangan yang sedikit maka hendaklah ia melakukan dengan bilangan yang sedikit, karena bilangan yang sedikit itu pasti sudah dilakukan. Hal ini dapat kita aplikasikan kepada perihal talaq, apabila seorang suami telah mentalag istrinya kemudian ia ragu tentang jumlah talag yang ia berikan, apakah talaq satu atau talaq dua, maka yang menjadi pijakan hukum adalah bilangan minimal, karena bilangan yang minimal adalah bilangan yang diyakini.³¹

³⁰ Abu Bakar al-Ahdal, Fara'idul Bahiyyah: Risalah Qawa'id Fiqh, terj. Moh. Adib Bisri (Kudus: Menara Kudus, 1997), 17.

³¹ Abdullah bin Muhammad 'Ubbadi al-Lahji, *Idlah al-Qana'id al-Fiqhiyyah*, vol. III (Surabaya: Dar al-Rahmah, 1410 H), 29.

الأَصْلُ في " Kemudian dari cabang kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak yaitu الْأَبْضَاع التَّحْرِيْمُ", maka hukum asal abdoi' (farj/kemaluan) adalah haram, maka munculah pemahaman bahwa bila hukum haram dan halal berkumpul pada diri satu orang wanita maka yang diunggulkan adalah hukum haramnya. Dengan kata lain, yang dijadikan pijakan hukum pada diri wanita adalah haram, sebab hukum asalnya adalah haram. Dan misalnya lagi, bila seseorang suami menalak tiga pada salah satu diantara keempat istrinya, tapi dikemudian hari ia lupa siapa istri yang telah ia ceraikan, maka terdapat dua pendapat hukum dalam hal ini, yaitu:

- 1. Untuk menentuan siapa yang halal atau yang masih sah sebagai istrinya dan siapa yang haram, maka harus dipilih dengan cara pengundian (qar'ah). Wanita yang tidak keluar undiannya mempunyai hukum halal bagi sang suami. Statemen pertama versi imam ahmad bin hambal ini didasari argumen, bila keadaan sangat mendesak (darurat), maka kedudukan undian sama dengan saksi atau informan (mukhbir) yang mampu memberi "informasi Hukum" secara valid.
- 2. Untuk menyelesaikan permasalahan diatas tidak dengan mengundi, namun harus tawaquf (diam) dan menunggu waktu sampai ada kejelasan, siapakah istri yang ditalak.

Statemen terakhir ini di dukung oleh ibnu qadamah, dan statemen awal di dukung oleh mayoritas ulama mazdhab Hambali.³²

Kemudian dalam cabang kaidah " أَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ " bisa di aplikasikan dalam hal:

- 1. Kewajiban-kewajiban suami istri yang hilang karena adanya perceraian.³³
- 2. Pasangan suami istri hidup bersama dalam waktu yang lama; Kemudian sang istri menyatakan bahwa sang suami tidak menyediakan pakaian dan nafkah, maka perkataan yang benar adalah perkataan sang istri, karena prinsip dasarnya adalah bahwa pakaian dan nafkah adalah tanggung jawab sang suami dan dia tidak melaksanakannya.

"مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوْ لَا؟ فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ" Kemudian dalam cabang kaidah bisa di aplikasikan dalam hal:

- 1. Termasuk keraguan apakah dia menceraikan satu istri atau lebih, maka yang dipegang adalah yang bilangannya sedikit.
- 2. Jika istri dalam masa iddah dan dia ragu, apakah itu masa iddah karena perceraian atau kematian? Maka yang dipegang dalam permasalahan ini adalah yang masa iddahnya lebih lama.

Dan untuk cabang kaidah "الْأَصْلُ الْعَدَمُ bisa di aplikasikan dalam hal: Jika seseorang berkata: "Jika burung itu adalah burung gagak, maka aku menalak isteriku",

³² Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Figh (Surabaya: Khalista, 2006), 157.

³³ H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

Dan lainnya berkata: "Jika bukan gagak, maka aku yang menalak isteriku", lalu burung tersebut terbang dan mereka tidak dapat mengenali, maka salah seorang di antara mereka boleh bersenang-senang dengan istrinya karena berpegang pada kaidah ini.

E. Pengecualian Kaidah

Kaidah "Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak" memiliki beberapa pengecualian, yaitu tindakan yang sudah tidak multi tafsir yang dimana kaidah ini tidak bisa digunakan untuk perbuatan yang demikian. Ibnu al-Qasas mengatakan dalam At-Talkhis: Tidak ada pengecualian dalam kaidah ini kecuali dalam sebelas permasalahan³⁴, diantaranya:

- 1. Jika seekor hewan mengencingi air yang banyak kemudian air itu berubah, tapi tidak diketahui apakah air itu berubah karena air kencing hewan tersebut atau yang lain, maka air itu hukumnya najis.
- 2. Wanita haid yang *mutahayyir*, wajib mandi setiap kali hendak shalat, diragukan telah terputus darahnya sebelum itu.
- 3. Jika terdapat najis pada pakaian atau badan dan tidak diketahui letaknya, maka wajib mencuci seluruhnya hingga bersih.
- 4. Seorang musafir ragu apakah dia sudah sampai di negaranya atau belum, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan rukhsoh.
- 5. Permasalahan haid dan sulusul baul, Jika dia berwudhu kemudian dia ragu, apakah hadasnya telah berhenti atau belum, Kemudian dia shalat dalam keadaan suci maka shalatnya tidak sah
- 6. Seseeorang yang melempar hewan buruan dan ia melukainya. Namun, hewan itu tiba-tiba hilang dari pandangannya lalu ia kemudian mencarinya, dan mendapati hewan itu sudah mati, ia tidak tau apakah hewan itu mati karena sebab dirinya atau sebab lain. Menurut sebagian ulama ia tidak boleh mengambilnya dan memakannya, meskipun ia melakukannya masih dalam keadaan ragu.35

F. Perbandingan Pandangan Mazhab

Kaidah al-Yaqīn lā yuzālu bi al-syak diterima oleh semua mazhab fikih, namun implementasinya bervariasi:

- Mazhab Syafi'i menerapkan kaidah secara tegas, terutama dalam ibadah dan muamalah yang tidak menerima keraguan kecuali dengan bukti kuat.
- Mazhab Hanafi mengakomodasi ghalabat al-zann (dugaan kuat) sebagai dasar dalam kondisi tertentu.
- Mazhab Maliki mempertimbangkan adat ('urf) sebagai unsur pembeda keyakinan.

³⁵ Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm al-Miṣrī, *al-Asybāh wa al-Nazā'ir 'Alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mā*, juz. 1 (cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H/1999 M), 63.

³⁴ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair* (Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1985), 72.

Mazhab Hanbali fleksibel dalam penerapan namun tetap menjunjung prinsip kepastian hukum.

G. Tinjauan Literatur Kontemporer

Dalam diskursus fikih kontemporer, kaidah al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak tetap dipandang sebagai prinsip universal dalam menjaga stabilitas hukum. Namun, para ulama modern menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dan maqāṣid al-syarī'ah dalam penerapannya.

Wahbah al-Zuḥailī, dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, menegaskan bahwa meskipun kaidah ini bersifat menyeluruh, penerapannya tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan kemaslahatan, sehingga diperlukan adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.³⁶ Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Aulawiyyāt memperingatkan bahwa penerapan kaidah secara literal dalam situasi sosial yang kompleks dapat mengakibatkan ketidakadilan. Menurutnya, pemahaman konteks dan skala prioritas menjadi penting untuk menjamin penerapan kaidah tetap mendatangkan maslahat.³⁷

Taqiy al-Dīn al-Subkī dalam analisis fikihnya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membatalkan suatu keyakinan hukum yang telah ada, khususnya dalam perkara yang menyangkut hak pribadi dan relasi keluarga. Ia menyatakan bahwa kaidah ini tidak berlaku jika syak mencapai level ghalabat alzann (dugaan kuat).38 Abd al-Karīm Zaydān menyoroti bahwa kaidah ini merupakan instrumen untuk menghindari vonis hukum yang tergesa-gesa akibat keraguan dan berfungsi sebagai pagar pelindung terhadap fluktuasi hukum berbasis prasangka.³⁹

Muhammad al-Ghazālī, dalam konteks yang lebih etis, menegaskan bahwa penerapan kaidah ini harus memperhatikan nilai-nilai moral Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Ia mengkritik praktik-praktik hukum yang menjadikan kaidah ini sebagai dalih untuk mempertahankan status quo yang merugikan istri atau anak. 405

Literatur kontemporer juga menegaskan pentingnya pembuktian hukum dalam praktik pengadilan. Kaidah ini, dalam banyak kasus hukum keluarga seperti talāq, nafkah, dan *iddah*, seringkali memerlukan pendukung administratif yang kuat untuk menghindari kekeliruan putusan akibat keraguan yang tidak berdasar.

Kesimpulan

Kaidah al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak merupakan salah satu prinsip utama dalam qawā'id fiqhiyyah yang telah diterima dan diaplikasikan oleh seluruh mazhab

³⁸ Taqī al-Dīn al-Subkī, *Fatāwā al-Subkī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 150–151.

³⁶ Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, vol. 1 (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), 144.

³⁷ Yūsuf al-Qaradawi, Figh al-Aulawiyyāt (Cairo: Maktabah Wahbah, 1992), 33–36.

³⁹ 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997), 273–275.

⁴⁰ Muḥammad al-Ghazālī, Asrār al-Ṣalāh wa Rūḥuhā (Cairo: Dār al-Shurūq, 1993), 89–91.

fikih. Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhailī dan Yusuf al-Qaradawi, menegaskan bahwa kaidah ini memiliki peran fundamental dalam menjaga kepastian hukum dalam pelbagai aspek kehidupan, khususnya dalam ranah ibadah. Namun, penerapannya dalam bidang fikih keluarga belum banyak dikaji secara rinci, terutama dalam konteks dinamika sosial kontemporer.

Tulisan ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kaidah al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak digunakan dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga seperti talāq, masa 'iddah, nafkah, dan pembuktian status pernikahan. Dalam analisisnya, artikel ini tidak hanya mengacu pada literatur klasik seperti al-Qarāfī dan al-Suyūţī, tetapi juga mempertemukannya dengan pendekatan modern yang mempertimbangkan magāsid al-syarī'ah dan realitas sosial.

Signifikansi dari tulisan ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum yang dikandung dalam kaidah ini tetap aplikatif, namun fleksibel terhadap perubahan konteks. Kebaruan dari kajian ini terletak pada identifikasi dan penjelasan terhadap batasan dan pengecualian kaidah tersebut dalam kasus-kasus fikih keluarga yang kompleks, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan kaidah ini agar tidak disalahgunakan untuk menjustifikasi kepentingan yang bias.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian ini adalah tidak disertakannya data empiris mengenai praktik penerapan kaidah di lembaga peradilan atau pengalaman para hakim. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan pendekatan yuridisempiris sangat diperlukan untuk menguji bagaimana prinsip ini dijalankan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapannya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia secara lebih luas.

Daftar Pustaka

Al-Dausarī, Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid. al-Mumti ' fī al-Qavā 'id al-Fiqhiyyah.

al-Ghazālī, Muḥammad. Asrār al-Ṣalāh wa Ruḥuhā. Cairo: Dār al-Shurūq, 1993.

Al-Lahji, Abdullah bin Muhammad 'Ubbadi. *Idlah al-Qawa'id al-Fighiyyah*, vol. III. Surabaya: Dar al-Rahmah, 1410 H.

Al-Miṣrī, Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm. al-Asybāh wa al-Nazā'ir 'Alā Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mā, juz. 1. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H/1999 M.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥiḥ Muslim ibn Ḥajjāj, jil. 4. Cet. II. Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H.

al-Qaradāwī, Yūsuf. Figh al-Aulawiyyāt. Cairo: Maktabah Wahbah, 1992.

Al-Qarafi, Syihab al-Din. Al-Furuq, Juz 1. Kuwait: Dar al-Nawadir, t.t.

al-Subkī, Taqī al-Dīn. Fatāwā al-Subkī, vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

- al-Zuhailī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. vol. 1. Damascus: Dār al-Fikr, 1985.
- Aqil al-Munawwar, Said. "Al-Qawaid al-Fiqiyyah dalam Perspektif Hukum Islam." al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies no. 62/XII (1998). State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga.
- Azra, Azyumardi, dkk. Ensiklopedi Islam, Jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bisri Musthofa. Ausathul Masalik Li Alfiyah Ibn Malik. Menara Kudus, 1953.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Djazuli, H.A. Kaidah-Kaidah Figih. Jakarta: Kencana, 2006.
- Haq, Abdul, dkk. Formulasi Nalar Figh. Surabaya: Khalista, 2006.
- Irawan, Ah Soni, dan Nina Agus Hariati. "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh Munakahat." Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam 2, no. 1 (2024): 15–26.
- Iskandar, Ariesman, Awal Rifai Wahab, dan Insan Kamil Mansyur. "Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 2 (19 Agustus 2021): 314-25. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.366.
- Jaih Mubarak. Kaidah Figh: Sejarah dan kaidah asasi. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. Al-Asybah Wan Nadhair. Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1985.
- Muhammad Sidqi ibn Ahmad Burnu. Al-Wajiz Fi Idah Qawa`Id Al-Fiqh Al-Kuliyyah. Beirut-Lubnan: Mu'assasat al-Risalah, 2002.
- Nurrosidha, Aulia, Jihan Fahriyyah, Rafli Fadhil Fazran, dan Annas Alpiqri. "Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan." NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam 13, no. 1 (1 Desember 2022): 1–12. https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1272.
- Rahmah, Siti. "Penerapan Kaidah اليقين لا يزول بالشك (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan) Dan Implementasinya Dalam Aktivitas Ekonomi Syariah." Ghanimah: Journal of Shariah Economics and Business 1, no. 1 (2025): 50–61.
- Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa. "Kaidah Fiqh Bidang Mu'amalah Mazhab Syafi'i." Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 6, no. 1 (2019): 32-49.
- Tamrin, Dahlan. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010. Zaydān, 'Abd al-Karīm. al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997.